

MIMBAR LSB PWM DIY DI PATUK Ngajeni, Budaya Lokal Dakwah Kultural



KR-Dedy EW

Pelaksanaan Mimbar Kebudayaan Muh 'Ngajeni'

WONOSARI (KR) - Lembaga Seni Budaya (LSB) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY menyelenggarakan Mimbar Kebudayaan di Balai Budaya Kalurahan Putat, Patuk, Sabtu (25/5). Kegiatan ini bekerjasama dengan LSB Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Gunungkidul dan berbagai potensi seni budaya warga Muh. Mimbar

melalui seni budaya. Sesuai risalah berkemajuan hasil Mukhtar," kata Wakil Ketua PWM DIY Iwan Setiawan.

Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Gunungkidul Agus Mantara MM, Ketua LSB PDM Gunungkidul Jayadi SPdI Msi.

Tampil dalam acara mimbar kebudayaan di antaranya anak-anak Muhammadiyah Gunungkidul dan LSB PDM Kabupaten kota se DIY. Mimbar budaya mengambil tema Muhammadiyah Ngajeni: (Ngaji Seni Caket Mring Ilahi). Ketua LSB PDM Gunungkidul Ustad Jayadi, Kamis (30/5) mengucapkan terimakasih kepada LSB PWM DIY atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadi tuan rumah.

(Ded)

PEMKAB TAMBAH KUOTA 25 PERSEN

Mulai Besok, Pembelian LPG 3 Kg Secara Digital

WONOSARI (KR) - Rencana pemerintah untuk melakukan pembelian LPG bersubsidi 3 kg secara digital berbasis kartu tanda penduduk (KTP) akan dimulai Sabtu (1/6) besok.

Sudah ada persiapan dengan pendataan KTP dan pangkalan akan melayani dengan aplikasi lewat HP android yang langsung terkoneksi dengan Pertamina pusat. Sementara Pemkab Gunungkidul mengaku belum menerima regulasi pelaksanaan tersebut.

"Sekarang ini kami juga mengajukan permintaan tambahan kuota LPG 3 kg

sebanyak 25 persen atau 125 tabung untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi beberapa waktu terakhir," kata Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Kelik Yuniartoro SSos MM, Kamis (30/5).

Penjelasan pelaksanaan pembelian LPG 3 Kg secara digital dengan menunjukkan KTP datang Drs



KR-Endar Widodo
Kelik Yuniartoro SSos MM

Siswanto MM dari Hiswana Migas DIY.

Menurutnya, programnya sebenarnya sudah

lama. Setelah dilakukan berbagai persiapan matang, akan dimulai 1 Juni ini. Semua agen dan pangkalan sudah dipersiapkan untuk pelaksanaannya. Pembelian ke pangkalan menunjukkan KTP dan tiap kepala keluarga (KK) kuota sebulan 4 tabung. Sementara pengecer dibatasi setiap pembelian 4 tabung. "Jika Pemda belum mendapat regulasinya bukan pelaksana teiknis, pemerintah untuk melakukan pengawasan saja," tambahnya.

(Ewi)

BARESKRIM MONITORING PUPUK

Kementan Tingkatkan Alokasi Pupuk Urea-NPK

WONOSARI (KR) - Tim monitoring pelaksanaan program subsidi pupuk bagi petani, Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri melakukan kunjungan ke Kabupaten Gunungkidul.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Herbert Nababan didampingi Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Tommy Nugraha, Senior Manager PT. Pupuk Indonesia Company Holding, diterima Bupati Gunungkidul H Sunaryanta.

Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Tommy Nugraha menyatakan tahun ini kementan akan menambah alokasi pupuk di Indonesia menjadi 115 persen.

Khusus di Kabupaten Gunungkidul menurut ada penambahan pupuk urea



KR-Istimewa

Tim monitoring pupuk dari Bareskrim di Gunungkidul.

Sehingga jumlahnya untuk alokasi pupuk tahun ini meningkat dari 12.390 ton menjadi 21.179 ton, sedangkan Pupuk NPK bertambah 9.181 ton sehingga meningkat dari 8.070 ton menjadi 17.251 ton. "Kabupaten Gunungkidul termasuk mendapat tambahan pupuk untuk tahun ini," ujarnya.

Bupati Gunungkidul H

harapkan penyaluran dan pemanfaatan sesuai dengan yang diharapkan. "Kami akan segera sosialisasikan kepada penerima manfaat," ucapnya.

Senior Manager PT Pupuk Indonesia wilayah Jateng DIY Antonius Yudhi Kristyanto menerangkan bahwa stok pupuk bersubsidi di Gudang Kabupaten Gunungkidul cukup untuk memenuhi kebutuhan saat ini, yaitu sekitar 1.500 ton urea dan 1.700 ton NPK. Namun demikian sejumlah kendala dan permasalahan seperti penyaluran akan dicari solusinya.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyerapan pupuk bersubsidi adalah curah hujan di bawah normal dan pada umumnya penebusan akan meningkat pada saat musim hujan di bulan Oktober-Desember. (Bmp)

Pemetaan TPS Jangan Menimbulkan Gejolak

WATES (KR) - Bawaslu Kabupaten Kulonprogo mengimbau kepada KPU Kulonprogo agar cermat dalam memetakan ulang tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pilkada 2024. Hal ini karena jumlah pemilih tiap TPS untuk Pilkada lebih banyak daripada Pemilu 2024 sehingga dilakukan pemetaan ulang ataupun penggabungan TPS.

Jika di Pemilu 2024 jumlah pemilih tiap TPS maksimal 300, sedangkan di Pilkada bisa mencapai 600, logikanya memang harus dipetakan ulang, bahkan dimungkinkan penggabungan, demi efisiensi. Namun jangan hanya karena demi efisiensi lalu timbul gejolak di masyarakat," jelas

Marwanto SSos Msi Ketua Bawaslu Kulonprogo di kantornya, Kamis (30/5).

Marwanto menambahkan, pemetaan ulang TPS memang menghemat anggaran. Misal di Pemilu 2024 di Kulonprogo ada 1.302 TPS, sekarang bisa hanya sekitar 700-800 TPS, itu bisa menghemat ratusan juta, bahkan mencapai miliaran. Tapi pemetaan ulang yang dipaksakan, yang membuat jarak pemilih dengan lokasi TPS jauh, sedikit banyak bisa menimbulkan gejolak. "Setidaknya akan mengurangi tingkat partisipasi pemilih. Jika pemilih malas datang ke TPS, politik uang akan tumbuh subur," tandas Marwanto.

(Wid)

MENINGKAT 4 KALI LIPAT DARI 2023

DBD Januari-Mei Capai 976 Kasus

WONOSARI (KR) - Terjadi lonjakan kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Gunungkidul dan berdasarkan catatan dan rilis Dinas Kesehatan angka peninhkatan cukup signifikan melonjak empat kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Tercatat ada empat korban jiwa selama ini mencapai 976 kasus.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Gunungkidul, Sidig Hery Sukoco, mengatakan dari awal tahun hingga pertengahan Mei lalu, jumlahnya masih 666 kasus. Hanya dalam rentang dua minggu terjadi peningkatan mencapai 310 kasus. Pada Januari 2024 terjadi 75 kasus, Februari 204 kasus, Maret 351 kasus, April 239 kasus, dan Mei 107 kasus. "Kasus DBD paling banyak di Kapanewon Wonosari dan Paliyan," katanya.

Dampak terjadinya kasus tersebut total kematian mencapai empat orang dan terakhir menimpa seorang anak berusia enam tahun dari Kapanewon Semin. Pasien tersebut sempat dirawat di Rumah Sakit yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit

Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito yang akhirnya anak tersebut meninggal pada Jumat (17/5) lalu. Beberapa hari sebelum seorang anak perempuan berusia 15 tahun juga meninggal karena kasus yang sama dan meninggal ketika masuk dalam fase dengue shock syndrome (DSS).

Untuk kasus DBD selama tahun 2023 yang hanya mencapai angka 260 kasus dengan satu kematian. Sementara, total kasus DBD pada 2022 ada 457 kasus dengan tiga kematian dan pada 2021 ada 189 kasus dengan tiga kematian.

Kepala Dinkes Gunungkidul, Ismono, mengatakan saat ini pihaknya telah selesai membahas anggaran tambahan untuk melakukan fogging. Jika disetujui, anggaran itu akan digunakan untuk penanganan DBD. Tambahan anggaran tersebut sudah memperhitungkan upaya surveilans kasus, upaya pengendalian vektor dan vektor pembawa penyakit, serta pengadaaan insektisida dan larvasida. "Saat ini Gunungkidul adalah daerah endemis DBD," ujarnya.

(Bmp)

RELAWAN ANAK BANGSA

Usulkan Sapto Ongko Balon Bupati

PENGASIH (KR) - Kolonel Laut (P) Dr Ir H R Sapto Ongko Putro AH MMSI diusulkan Relawan Anak Bangsa (RAB) untuk maju bakal calon (balon) bupati pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kulonprogo.

"RAB merupakan organisasi simpatisan pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Usulan untuk Pak Ongko yang merupakan warga Kulur Temon maju pilkada Kulonprogo akan disampaikan ke Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Sosok yang diusulkan merupakan keinginan dari anggota RAB yang ada di Kulonprogo," kata Kepala Koordinator Daerah (Korda) RAB DIY, Asep Susilo, Selasa (28/5) sore, di Sekretariat RAB DIY dan Kulonprogo di wilayah Kapanewon Pengasih.

Dikatakan Asep, Kolonel Laut (Purnawirawan) Sapto Ongko selain merupakan warga asli Kulonprogo juga sebagai sosok calon pemimpin yang ideal bagi Kulonprogo. Sebab dengan latar belakang militer, dinilai mampu membuat berbagai kebijakan yang cepat dan



KR-Widiastuti

Pengurus RAB DIY dan Kulonprogo.

tepat.

Sapto Ongko tidak hanya berkarir di militer, namun sempat berkarir di Kementerian Pertahanan hingga menjadi Dosen Utama Bela Negara dari 2020 hingga sekarang di Universitas Pertahanan. Ongko yang merupakan Pembina dari RAB dan memiliki peran dalam upaya pemenangan Prabowo-Gibran di Kulonprogo dalam Pilpres 2024. "Kami menilai Pak Ongko bisa memberikan warna baru untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kulonprogo," ucap Asep.

Ongko diketahui belum mendaftarkan diri ke partai politik manapun untuk terjun ke Pilkada 2024. "Kami sudah menyiapkan langkah untuk mendorong Pak Ongko maju ke

Pilkada 2024. Setelah deklarasi, RAB berencana membawa hasilnya langsung ke Pak Ongko sebagai pembina dan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Harapannya bisa mendapatkan rekomendasi," ujarnya sembari menambahkan bahwa pihaknya akan mendampingi Pak Ongko dalam melakukan lobi-lobi politik, baik dengan Partai Gerindra di Kulonprogo maupun dengan parpol lainnya.

Sementara itu, Kepala Koordinator Kabupaten (Korkab) RAB Kulonprogo, Salman Alfarisi Iqbal Hatta SH mengaku optimis Sapto Ongko akan mendapat dukungan dari warga Kulonprogo. Keyakinannya didasari pada jaringan dimiliki. (Wid)

Kulonprogo Calon Percontohan Kabupaten/ Kota Antikorupsi

WATES (KR) - Kulonprogo terpilih menjadi salah satu calon percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi. Salah satu tahapan yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait program tersebut.

Menurut Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, KPK, Rino Haruno, Kulonprogo terpilih setelah pihaknya melakukan observasi pada Februari-Maret 2024 lalu. "Observasi kami lakukan pada 15 kabupaten/kota yang diajukan tiap provinsi untuk mengikuti program tersebut," kata Rino di Aula Adikarta, Kompleks Kantor Pemkab Kulonprogo baru-baru ini.

Dari hasil observasi, empat kabupaten/kota yang lolos ke tahapan penilaian selanjutnya. Selain Kulonprogo, terdapat Kabupaten

Badung, Bali, Kota Payakumbuh, Sumbar dan Kota Surakarta, Jateng. Empat kabupaten/kota tersebut terpilih lantaran keseriusan pemerintah setempat dalam mencegah praktik korupsi. Upaya itu pun juga melibatkan peran serta masyarakat.

"Ada unsur kearifan lokal yang dilibatkan dalam upaya tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut Rino mengungkapkan, empat kabupaten/kota itu masih harus memenuhi penilaian terdiri dari enam komponen dan 19 indikator. Pihaknya berharap Pemkab Kulonprogo mampu memenuhi penilaian tersebut.

Inspektur Inspektorat Daerah (Irda) DIY, Muhammad Setiadi menjelaskan, Kulonprogo diajukan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengikuti program tersebut. Selain kabupaten ini,



KR-Asrul Sani

Rino Haruno menyerahkan buku Kabupaten/ Kota Anti Korupsi pada Pj Bupati Kulonprogo Srie Nurkyatsiwi.

Bantu juga ikut diajukan. Kami mendorong Kulonprogo bisa menjadi yang terbaik sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi oleh KPK," ujarnya.

Sementara itu Pj. Bupati Kulonprogo, Srie Nurkyatsiwi MMA bersyukur kabupaten ini mendapat kepercayaan dari KPK sebagai calon percontohan. Dirinya menilai predikat tersebut menjadi tantangan bagi ja-

jarannya. "Kami akan mendorong upaya pencegahan korupsi sampai tingkat paling bawah. Termasuk memastikan seluruh pihak memiliki komitmen penuh mencegah terjadinya korupsi. Kami harus bisa membuktikan Kulonprogo mampu menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," tegasnya.

(Rul)

SEMUA PIHAK DIMINTA DUKUNG DIGITALISASI KEUANGAN DAERAH

2023, Capaian Indeks ETPD Capai 96,8%

TEMON (KR) - Dalam upaya meningkatkan komitmen dan koordinasi antarinstansi dalam mendorong pertumbuhan ekosistem keuangan digital di Kabupaten Kulonprogo, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) gelar High Level Meeting dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

"Upaya digitalisasi keuangan daerah diharapkan menjadi budaya Pemkab Kulonprogo dan masyarakat secara umum. Sehingga ini menjadi *habbit* dan ekosistem yang mendukung upaya mewujudkan *good governance* dan *clean government* di Kulonprogo," kata Pj. Bupati setempat Ir Srie Nurkyatsiwi membuka High Level Meeting dan Capacity Building TP2DD di Hotel Novotel YIA, Temon, Kamis (30/5).

Untuk itu pihaknya men-



KR-Asrul Sani

Pj Bupati Srie Nurkyatsiwi (tengah) foto bersama para peraih penghargaan capaian realisasi non tunai terbaik.

dorong komitmen seluruh unsur mendukung penuh proses digitalisasi keuangan daerah meskipun masih terdapat beberapa tantangan bagi penerapannya.

"Dengan melihat kondisi di lapangan maka dukungan dan komitmen kita bersama dibutuhkan, agar upaya digitalisasi keuangan daerah melalui perluasan kanal pembayaran bisa berjalan optimal," jelasnya.

Sementara itu Kepala BKAD Kulonprogo, Taufiq Amrullah ST MM menyampaikan Capaian Indeks ETPD Kabupaten Kulonprogo 2023 mencapai 96,8 persen dengan level digital. Aspek penilaian kinerja TP2DD diukur dari Aspek Proses sebesar 30 persen, Aspek Output 40 persen dan Aspek Outcome 30 persen.

"Tahun 2023 Kabupaten Kulonprogo mendapat per-

ingkat 36 dari 416 kabupaten di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor di antaranya jumlah aspek proses di Kabupaten Kulonprogo terlampau sedikit dan rendahnya skor program unggulan salah satunya diakibatkan oleh kurangnya implementasi," ungkapnya.

Secara umum tambah Taufiq, gambaran perkembangan ETPD di Pemkab Kulonprogo pada 2023 adalah melalui penerapan digitalisasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Dalam kesempatan tersebut diberikan apresiasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) Pengelola Pendapatan yang mencapai realisasi non tunai terbaik sampai dengan 30 April 2024. Terbaik pertama diberikan kepada Dinas Kebudayaan (Kundha Kebudayaan) dan kedua Dinas Dikpora. (Rul)